

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan Padang-ByPass yang dimulai sejak 2014 mengalami kendala dalam pembebasan lahan. Dalam hal ini muncul resistensi dari pemilik atau penguasa lahan yang akan dibebaskan. Mereka beralasan bahwa masih adanya permasalahan konsolidasi lahan pada saat pembebasan pada tahun 1990-an yang sampai saat ini belum dituntaskan oleh Pemerintah Kota Padang.

Hasil wawancara penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik lahan merasa dirugikan oleh kebijakan Pemerintah Kota Padang pada pembebasan lahan Padang-Bypass di masa lalu. Mereka juga merasa bahwa janji-janji pemerintah di masa lalu tidak sepenuhnya ditepati. Karena itu mereka menyuarakan keinginannya dengan bersikap resisten baik secara langsung di dalam acara tatap muka dengan pejabat pemerintah maupun melalui pesan-pesan yang ditulis pada poster serta rambu atau penghalang jalan di lokasi yang dianggap bermasalah.

Mencermati kondisi tersebut Pemerintah Kota Padang lalu membuka komunikasi dengan pemilik lahan bermasalah melalui penugasan kepada Tim Penyelesaian Masalah Lahan Pembangunan Jalur II Jalan Padang-ByPass. Tim segera menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya kegiatan pelebaran jalan Bypass, peraturan dan mekanisme pembebasan lahan serta alternatif solusi yang

ditawarkan, baik secara formal maupun informal dalam bentuk pendekatan antarpribadi. Masyarakat pun menanggapi dengan menyampaikan keluhan mereka. Terjadilah proses komunikasi dalam bentuk dialog.

Didalam proses komunikasi tersebut gangguan komunikasi yang muncul bersifat psikologis yaitu persepsi negatif. Hal tersebut meliputi kebohongan, kecurigaan, kesimpangsiuran informasi, ketidakpatuhan terhadap konsensus, adanya pengaruh dari kelompok kecil dan pemaksaan kehendak. Proses komunikasi yang baik terbukti dapat menghilangkan sebagian besar gangguan psikologis tersebut. Hal ini dapat dilihat dari percepatan penurunan lahan bermasalah setelah Tim membuka komunikasi kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarpribadi yang diterapkan Tim dalam berhubungan dengan masyarakat membawa hasil lebih baik jika dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya yang relatif formal. Dari penelitian juga terlihat bahwa penerapan Teori Akomodasi Komunikasi dan Teori Pertukaran Sosial oleh aparat Pemerintah Kota Padang dapat mengatasi resistensi warga. Namun demikian perlu disadari bahwa penerapan teori-teori komunikasi antarpribadi yang tidak efektif akan dapat menurunkan penghargaan masyarakat kepada pihak pemerintah sekaligus memperlambat proses negosiasi.

5.2. Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Teori Akomodasi Komunikasi dan Teori Pertukaran Sosial memberikan dampak yang signifikan

dalam proses pendekatan aparat pemerintah dengan warga untuk penyelesaian pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Teori-teori ini bisa direkomendasikan untuk dapat diterapkan untuk kasus-kasus pembebasan tanah lainnya dalam proyek-proyek Pemerintah.

Meskipun studi ini mengindikasikan langkah-langkah komunikasi yang ditempuh oleh aparat Pemerintah Kota Padang memperoleh hasil yang cukup positif dalam proses pembebasan lahan Padang-Bypass, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang komunikasi antarpribadi terutama pada tingkat struktur pemerintahan manakah komunikasi antarpribadi itu paling efektif dilakukan. Apakah komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh pejabat setingkat lurah akan kurang efektif dibandingkan komunikasi antarpribadi oleh pejabat setingkat camat atau walikota, atau sebaliknya.

Selain itu karena penelitian ini hanya mengambil lokus penelitian di Kecamatan Kuranji, maka diperlukan juga penelitian lanjutan terhadap kecamatan-kecamatan bermasalah lain di sepanjang jalur Padang-ByPass.

